

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS KUALA BHEE
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
SARJANA EKONOMI Pada
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

OLEH :

**FERDYAN ARDHANA
NPM : 2202110074**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Februari 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FERDYAN ARDHANA
NPM : 2202110074

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) PADA PUSKESMAS KUALA BHEE KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II

Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Februari 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FERDYAN ARDHANA
NPM : 2202110074

Dengan judul:

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
(BOK) PADA PUSKESMAS KUALA BHEE KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 31 Januari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

Ermad MJ, S.E., M.Si
NIK. 19870616 201608 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 12 Februari 2025
Yang Menyatakan



Ferdyan Ardhana

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ferdyan Ardhana
NPM : 2202110074
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS KUALA BHEE KABUPATEN ACEH BARAT

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Ferdyan Ardhana

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Budi Safatul Anam, SE, M.Si, Ak selaku ketua Prodi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Ibu Irmawati, S.E., M.Si, Ak CA selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Ibu Cut Fitrika Syaalina, S.E., M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Landasan Teoritis	8
2.1.1 Keuangan Daerah	8
2.1.2 Anggaran	9
2.1.3 Anggaran Sektor Publik	10
2.1.4 Fungsi Anggaran	12
2.1.5 Prinsip-Prinsip Anggaran	14
2.1.6 Proses Penyusunan Anggaran.....	14
2.1.7 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).....	15
2.1.8 Efisiensi	19
2.1.9 Efektivitas.....	21
2.2 Penelitian Sebelumnya	23
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	31
3.1.1. tujuan Penelitian.....	31
3.1.2. Jenis Penelitian.....	31
3.1.3. Horison Waktu	31
3.1.4. Unit Analisis.....	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
3.3 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Profil Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat	34
4.1.2 Visi dan Misi Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.....	35

4.1.3 Strategi Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat	36
4.2. Hasil Penelitian	38
4.2.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) Pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.....	38
4.2.2 Analisis Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.....	38
4.2.3 Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.....	44
4.3. Pembahasan	46
4.3.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat	46
4.3.2 Efektifitas Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024	20
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi	20
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektifitas	23
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	27
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 s/d 2024.....	45
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 s/d 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Laporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2022-2024	54
---	----

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS KUALA BHEE
KABUPATEN ACEH BARAT**

**FERDYAN ARDHANA
NPM : 2202110074**

Pembimbing I : Irmawati, S.E., M.Si, Ak, CA.
Pembimbing II : Cut Fitrika Syaalina, S.E., M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2022 dan tahun 2024 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 dan 2024 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kemudian Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2023 dapat dikelola dengan cukup efektif karena tingkat persentase antara 80-90%.

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Efektifitas*

*ANALYSIS OF HEALTH OPERATIONAL ASSISTANCE FUND MANAGEMENT
(BOK) AT KUALA BHEE PUBLIC HEALTH CENTER
WEST ACEH REGENCY*

FERDYAN ARDHANA
NPM: 2202110074

Supervisor I : Irmawati, S.E., M.Si
Supervisor II : Cut Fitrika Syaalina, S.E., M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Management of Health Operational Assistance Funds (BOK) at Kuala Bhee Health Center, West Aceh Regency in 2022-2024. The analysis model used is the quantitative descriptive analysis method, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field which is focused on the management of Health Operational Assistance (BOK) funds at Kuala Bhee Health Center, West Aceh Regency using the effectiveness ratio. The results of the study indicate that the management of the Health Operational Assistance Fund (BOK) at the Kuala Bhee Health Center, West Aceh Regency is managed based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 18 of 2024 concerning Technical Instructions for the Management of Health Operational Assistance Funds which includes planning, implementation of activities, reporting, and monitoring and evaluation. The realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget in 2022 and 2024 can be said to be effective because the percentage level is between 90-100%. This means that the management of the Health Operational Assistance (BOK) fund at the Kuala Bhee Health Center, West Aceh Regency in 2022 and 2024 is managed well even though there is still a lot of remaining Health Operational Assistance (BOK) budget. Then the realization of the Health Operational Assistance (BOK) budget in 2023 can be managed quite effectively because the percentage level is between 80-90%.

Keywords: Management of Health Operational Assistance (BOK) Fund Allocation and Effectiveness

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memperkuat peran dan fungsi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan utama di Indonesia. Puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pemerintah terus melakukan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dan non-medis di puskesmas. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, serta tenaga administrasi lainnya perlu memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi medis dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk renovasi dan pengadaan sarana prasarana di puskesmas, seperti ruang pelayanan, alat kesehatan, laboratorium, serta fasilitas sanitasi yang memadai. Puskesmas yang modern dan lengkap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pemerintah pusat memberikan dana bantuan operasional kesehatan kepada puskesmas untuk mendukung kelancaran operasional, termasuk pembelian obat-obatan, alat medis, dan biaya administrasi lainnya. BOK bertujuan untuk memastikan puskesmas tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK merupakan dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan

bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi. BOK ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas. BOK diarahkan untuk mendukung operasional kegiatan, yang meliputi: Upaya Kesehatan Masyarakat primer (Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial dan Pengembangan, dan fungsi manajemen Puskesmas), pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) desa lokus, dukungan operasional Upaya Kesehatan Masyarakat tim nusantara sehat, dan penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja (Permenkes RI No.86, 2019).

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memiliki peran yang sangat penting. Pembangunan kesehatan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, pemerataan, dan keberlanjutan. BOK menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. BOK membantu memastikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu dapat menyediakan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kurang mampu. Dana ini digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional yang langsung berdampak pada peningkatan pelayanan.

BOK juga digunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit, baik penyakit menular (seperti malaria, TB, dan HIV/AIDS) maupun penyakit tidak menular (seperti hipertensi dan diabetes).

Melalui BOK, fasilitas kesehatan dapat melaksanakan kegiatan promosi kesehatan, penyuluhan, serta deteksi dini penyakit yang berisiko tinggi bagi masyarakat. Dengan adanya BOK, fasilitas kesehatan, terutama puskesmas, memiliki dana untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Dana operasional yang cukup memungkinkan puskesmas atau rumah sakit untuk mengembangkan sistem manajemen, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperbaiki sarana dan prasarana yang tersedia.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 2 yaitu Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Sedangkan pasal 3 yaitu pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kementerian Kesehatan menetapkan total alokasi BOK Puskesmas per kabupaten/kota. Melalui langkah-langkah perhitungan yang diatur dalam Permenkes No. 42 Tahun 2022, Dinas Kesehatan menetapkan besaran alokasi dana BOK melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota. Berdasarkan Laporan Tahunan Kementerian Keuangan, besarnya alokasi dana BOK secara nasional pada tahun 2022 mencapai Rp 9,93 Triliun, sedangkan alokasi dana BOK di tingkat provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp 478

Miliar. Dan alokasi dana BOK di tingkat Kabupaten Gowa sebesar Rp 25,2 Miliar (DJPK Kemenkeu, 2022).

Permasalahan seperti terbatasnya sumber daya manusia kesehatan di pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan terbatasnya kemampuan pengelolaan keuangan dan pengelolaan pusat pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi saat ini. Peranan pimpinan Puskesmas penting dalam mencapai tujuan organisasi Puskesmas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penanggung jawab pusat pelayanan kesehatan masyarakat harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan manajemen proyek yang baik. Selain itu, pimpinan pusat pelayanan kesehatan masyarakat juga berperan sebagai manajer dan inovator (Ponno et al., 2024). Pemahaman masing-masing puskesmas dalam merencanakan pemanfaatan BOK juga belum berdasarkan prioritas dana BOK dialokasikan untuk semua secara merata. Adapun penyebab serapan yang belum maksimal dikarenakan kekurangan SDM. Kekurangan SDM ini membuat petugas puskesmas merangkap pekerjaan sehingga pelaksanaan tidak maksimal. Akibatnya dana BOK tidak terserap dengan optimal dan berdampak pada rendahnya realisasi dana BOK (Wibowo et al., 2023).

Fenomena yang terjadi dilihat dari hasil penelitian sebelumnya yang sama-sama melakukan penelitian di Puskesmas yaitu seperti penelitian dari Megawati et al. (2023) mengatakan analisis efisiensi dapat diketahui penggunaan Dana BOK Puskesmas masuk dalam kategori dapat diprediksi (*predictable*). Terlihat pada saat pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang tidak terdani oleh Dana BOK dapat dilaksanakan dengan cara bergabung dengan kegiatan yang di di danai oleh Dana BOK. Pengelolaan Dana BOK puskesmas

masuk dalam kategori efektif. Terbukti dengan naiknya capaian kinerja dari 2020 ke 2021, walau belum mencapai target. Tingkat kemandirian puskesmas dalam mengelola Dana BOK masuk dalam kategori *predictable* artinya puskesmas mampu menjabarkan, mengelola, dan memprediksi proses agar dapat selalu menjaga keutamaan dalam pelayanan maupun keluaran yang diberikan pada masyarakat terutama pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Kemudian hasil penelitian dari Nopel (2022) mengatakan bahwa pengelolaan dana BOK di puskesmas sudah berjalan sesuai petunjuk teknis pengelolaan BOK tahun 2020. Hal ini berarti bahwa pengelolaan dana BOK di puskesmas sudah terlaksana dengan baik. Namun di bagian pelaporan belum terlaksana tepat waktu karena didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk mengetahui realisasi anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat
tahun 2022-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase
1	2022	940.932.060	938.932.060	2.000.000	99,79%
2	2023	931.066.200	829.809.266	101.256.934	89,12%
3	2024	739.480.219	675.565.323	63.914.896	91,35%

Sumber: Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat realisasi anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat terdapat perkembangan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan tingkat persentase semakin menurun, yaitu pada tahun 2023 dengan realisasi yang dicapai masih dibawah 90% meskipun jumlah anggaran BOK pada Puskesmas

Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 mengalami penurunan sehingga hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini, karena umumnya jumlah anggaran semakin lama semakin meningkat dari pemerintah pusat. Jumlah anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 sebesar Rp 940.932.060 dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,79%, kemudian pada tahun 2023 anggaran sebesar Rp 829.809.266 dengan tingkat persentase realisasi anggaran 89,12% dan pada tahun 2024 anggaran BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp 675.565.323 dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 91,35%. Menurut pegawai Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat adanya sisa anggaran setiap tahun disebabkan tidak adanya kasus mengenai kesehatan yang terjadi pada masyarakat kecamatan Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat sehingga anggaran tidak terealisasi dan juga disebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah bagaimanakah analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai mengenai pengelolaan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan keuangan
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi pemerintah Aceh dan kepada satuan kerja perangkat kabupaten serta lingkungan puskesmas khususnya mengenai mengenai pengelolaan keuangan

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Khusaini (2018:2) menjelaskan bahwa suatu pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi proses dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan dalam keuangan daerah. Menurut Siregar (2020:11) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011, Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengum-pulan data, pencatatan, pengihkti-saran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertang-gungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut Siregar (2020:11) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu keseluruhan kegiatan yang di dalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah bertujuan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Keuangan daerah merujuk pada seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan di tingkat pemerintah daerah.

2.1.2 Anggaran

Berdasarkan pendapat Suparmoko (2021:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Menurut Bastian (2021:25) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Anthony dan Govindarajan (2021:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah

dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Mardiasmo (2020:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Menurut Prawironegoro (2021:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran berfungsi sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan negara atau daerah, yang mencakup sumber daya yang akan diterima (pendapatan) dan bagaimana sumber daya tersebut akan dibelanjakan (belanja). Anggaran juga menggambarkan alokasi dana untuk kegiatan atau tertentu. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai alat paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.

2.1.3 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2020:12) anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan.

yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, distribusikan dan diberi masukan.

Pemerintah Indonesia telah menjadikan anggaran belanja pendidikan sebagai prioritas utama dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari tingkat provinsi juga menjadi prioritas sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara. Alokasi Anggaran belanja pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi.

Menurut Halim (2020:102) memberikan definisi anggaran sektor publik menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan negara dan daerah, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan layanan dasar, dan mendukung pembangunan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2020:63) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*;
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Menurut Mardiasmo (2020;66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional yaitu digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah “belanja rutin” . Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut “belanja rutin” karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.
2. Anggaran Modal yaitu menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.1.4 Fungsi Anggaran

Menurut Bastian (2021;191) fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja;
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang;
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan;
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja;
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi;
6. Anggaran merupakan instrumen politik;
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2020;63) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*). Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*). Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*). Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*). Dalam organisasi sektor public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program yang telah dijanjikan.
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*). Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*). Anggaran adalah suatu ukuran yang bias menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*). Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*). Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran adalah tujuan utama dari penyusunan dan pengelolaan anggaran yang dirancang untuk memandu pengelolaan keuangan dalam berbagai sektor, baik di pemerintah, organisasi, maupun perusahaan. Secara umum,

anggaran memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung kegiatan operasional dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Anggaran

Menurut Mardiasmo (2020;67), prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut;
2. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif;
3. Keutuhan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*);
4. *Nondiscretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif;
5. Periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan;
6. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan *inefisiensi* anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran;
7. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan;
8. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip anggaran adalah pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dilakukan dengan cara yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

2.1.6 Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran menurut Mardiasmo (2020;68) mempunyai empat tujuan, yaitu :

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan anggaran adalah langkah penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks pemerintahan, organisasi, atau perusahaan. Penyusunan anggaran dimulai dengan perencanaan yang matang, yang mencakup identifikasi kebutuhan dan prioritas program. Anggaran disusun berdasarkan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan proyeksi pendapatan serta pengeluaran.

2.1.7 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung operasional kegiatan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. BOK bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya (Ponno et al., 2024:4). Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, untuk mendukung kelancaran operasional, termasuk biaya kegiatan pelayanan kesehatan, penyediaan obat, alat kesehatan, serta biaya administrasi dan

operasional lainnya. BOK bertujuan untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan terjangkau oleh masyarakat (Wibowo et al., 2023:54).

BOK dapat didefinisikan sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil dan miskin, dapat menyediakan layanan kesehatan yang memadai tanpa adanya hambatan finansial yang besar. BOK digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, promosi kesehatan, dan pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu (Megawati et al., 2023:21). BOK adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional fasilitas kesehatan, seperti biaya tenaga medis, obat-obatan, sarana dan prasarana, serta biaya lain yang mendukung operasional sehari-hari. Dana ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh puskesmas atau rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatan (Nopel, 2022:65).

BOK adalah bantuan yang diberikan untuk memastikan kelancaran operasional puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Dana BOK digunakan untuk pembelian obat, vaksin, alat kesehatan, biaya tenaga medis, serta biaya administrasi dan operasional lainnya (Saharuddin & Katjina, 2021:167). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 alokasi bantuan operasional kesehatan yaitu Alokasi dana per kabupaten/kota. Besaran alokasi dana BOK untuk setiap tahun ditetapkan berdasarkan SK menteri kesehatan.

Dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional yaitu: Dana yang disesuaikan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terbatas pada fisik dan peralatan serta obat-obatan saja melainkan juga digunakan untuk belanja yang lain dan

alokasinya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan yaitu: Dana BOK adalah yang diterima dan dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan upaya kesehatan masyarakat disetiap jenjang. Dana BOK yang telah dialokasikan disetiap dinas kesehatan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan upaya kesehatan masyarakat oleh dinas kesehatan dan jaringannya. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari dana BOK berdasarkan petunjuk teknis yang ada:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan: BOK digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, maupun klinik lainnya, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan efektif.
2. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan: Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan untuk mendukung proses penyembuhan pasien atau pencegahan penyakit.
3. Penyelenggaraan Program Kesehatan: BOK mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, promosi kesehatan, dan kegiatan lainnya.
4. Penyediaan Tenaga Kesehatan: BOK dapat digunakan untuk pembiayaan tenaga kesehatan, baik itu honorarium tenaga medis yang mendukung operasional di fasilitas kesehatan.

5. Penguatan Sistem Kesehatan: Dana ini juga berfungsi untuk memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, termasuk dalam aspek manajemen dan pengelolaan fasilitas kesehatan agar lebih efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Dengan adanya dana ini, diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, khususnya di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh fasilitas kesehatan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023, yang meliputi empat tahap utama:

1. Perencanaan dan Persiapan Teknis

Pada tahap ini, pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan (seperti puskesmas atau rumah sakit) melakukan:

- a. Penyusunan rencana kegiatan yang mencakup alokasi dana sesuai dengan prioritas kesehatan.
- b. Menyusun rencana anggaran yang mencakup pembelian obat, alat kesehatan, serta kegiatan operasional lainnya.
- c. Persiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kesehatan yang akan dilakukan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah perencanaan disusun, dana BOK digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kesehatan, yang meliputi:

- a. Pemberian layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit, pengobatan, dan promosi kesehatan.
 - b. Pembelian obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan.
3. Pelaporan
- Setiap penerima dana (puskesmas, rumah sakit, atau pemerintah daerah) wajib membuat laporan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel.
4. Pemantauan dan Evaluasi
- Proses pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa dana BOK digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.8 Efisiensi

Menurut Halim (2020:234) Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Menurut Mahmudi (2021:83) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*. Menurut Bastian (2021:59) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi diukur dengan ratio output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mahmudi, 2021:133).. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2021:133):

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini (Mahmudi, 2021:133):

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2021)

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para ahli di atas, dapat disimpulkan efisien merupakan tingkat pencapaian maksimum yang telah

ditentukan atau suatu ukuran dalam membandingkan dengan sumber-sumber yang digunakan. Indikator efesien merupakan ukuran terhadap hubungan antara input dengan ouput untuk suatu waktu tertentu.

2.1.9 Efektivitas

Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun (Robbins, 2020:8).

Menurut Mahmudi (2021:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Mardiasmo (2021:134) rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang

berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut pendapat Azlin (2020:18) mengatakan beberapa ukuran dari Efektivitas,yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai suatu penghematan,

karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahsun (2021:187) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektivitas menurut Mahsun (2021:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2021:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektivitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Ponno et al. (2024) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Awan Rantekarua. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Rencana

pengelolaan keuangan BOK Puskesmas Awan Rantekarua meliputi perencanaan Rencana Usulan kegiatan (RUK) yang kemudian tersusun menjadi Rencana Kegiatan (RPK), yang kemudian di rapatkan bersama dengan kapus untuk disetujui dan kemudian diserahkan ke bagian verifikator untuk diverifikasi dan selanjutnya diserahkan ke kepada dinas untuk disetujui dan dicairkan. Pelaporan dana BOK dilaporkan secara triwulan ke Dinas Kesehatan disertai laporan pertanggungjawaban sebagai bukti bahwa dana BOK telah digunakan dan pelaporannya dipublikasikan dengan cara ditempel di papan pengumuman puskesmas.

Wibowo et al. (2023) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023. Penelitian ini adalah penelitian komparatif dimana penelitian ini berfokus pada perbandingan realisasi analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diambil pada objek Dinkes , dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Shiddiq dan Choiri, (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2023 di Dinas Kesehatan . Hasil Penelitian : pengelolaan dana BOK dilihat dari aspek perencanaan dapat dijabarkan bahwa pengelolaan dana BOK di Dinkes 100% sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022 yaitu diawali dari alokasi BOK dilihat dari rencana pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan surat pengajuan SPM GU ke BPKAD yang didasarkan pada jumlah

penduduk yang ada disekitar wilayah kerja tiap Puskesmas, kondisi sekitar wilayah kerja puskesmas dan yang diusulkan. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan dalam penyusunan RUK dan RPK di tiap Puskesmas juga sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022

Megawati et al. (2023) dengan judul Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Tingkat Kemandirian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Menilai Capaian Kinerja Di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan. Hasil analisis efisiensi dapat diketahui penggunaan Dana BOK Puskesmas Gemaharjo masuk dalam kategori predictable. Terlihat pada saat pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang tidak terdani oleh Dana BOK dapat dilaksanakan dengan cara bergabung dengan kegiatan yang di di danai oleh Dana BOK. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas masuk dalam kategori efektif. Terbukti dengan naiknya capaian kinerja dari 2020 ke 2021, walau belum mencapai target. tingkat kemandirian Puskesmas Gemaharjo dalam mengelola Dana BOK masuk dalam kategori predictable artinya Puskesmas Gemaharjo mampu menjabarkan, mengelola, dan memprediksi proses agar dapat selalu menjaga keutamaan dalam pelayanan maupun keluaran yang diberikan pada masyarakat terutama pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

Penelitian dari Nopel (2022) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci Tahun 2020. Teknik dan pengambilan data dalam penelitian ini adalah wawancara, data tertulis dan dokumentasi. alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan, pensil atau pena, kertas, dan audio recorder. Informan penelitian berjumlah 3 orang yaitu kepala puskesmas, penanggung

jawab BOK Puskesmas, dan penanggung jawab kesehatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sanggaran Agung sudah berjalan sesuai petunjuk teknis pengelolaan BOK tahun 2020. Hal ini berarti bahwa Pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sanggaran Agung sudah terlaksana dengan baik. Namun di bagian pelaporan belum terlaksana tepat waktu karena didukung oleh SDM yang berkualitas. Disarankan kepada pengelola BOK agar SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana diberi bekal materi yang cukup mengenai system pelaporan.

Penelitian dari Saharuddin & Katjina (2021) dengan judul Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Baubau telah memenuhi tujuan akuntabilitas dengan baik dan bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan transparan, hal ini terlihat pada sistem kesiapsagaan yang melibatkan semua pihak yaitu pelayanan kesehatan, petugas Dinas Kesehatan Kota Baubau dapat dikatakan berjalan dengan baik. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Model penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Awan Rantekarua (Ponno, et al. 2024)	Penelitian Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Rencana pengelolaan keuangan BOK Puskesmas Awan Rantekarua meliputi perencanaan Rencana Usulan kegiatan (RUK) yang kemudian tersusun menjadi Rencana Kegiatan (RPK), yang kemudian di rapatkan bersama dengan kapus untuk disetujui dan kemudian diserahkan kepada verifikator untuk diverifikasi dan selanjutnya diserahkan ke kepada dinas untuk disetujui dan dicairkan. Pelaporan dana BOK dilaporkan secara triwulan ke Dinas Kesehatan disertai laporan pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa dana BOK telah digunakan dan pelaporannya dipublikasikan dengan cara ditempel di papan pengumuman puskesmas.	Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 (Wibowo et al., 2023)	Penelitian Kualitatif	Hasil Penelitian : pengelolaan dana BOK dilihat dari aspek perencanaan dapat dijabarkan bahwa pengelolaan dana BOK di Dinkes 100% sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022 yaitu diawali dari alokasi BOK dilihat dari rencana pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan surat pengajuan SPM GU ke BPKAD yang didasarkan pada jumlah penduduk yang ada disekitar wilayah kerja tiap Puskesmas, kondisi sekitar wilayah kerja puskesmas dan yang diusulkan. Tahap selanjutnya yaitu perencanaan dalam penyusunan RUK dan RPK di tiap Puskesmas juga sudah sesuai dengan peraturan PMK No.204 Tahun 2022	Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Tabel 2.3 Lanjutan

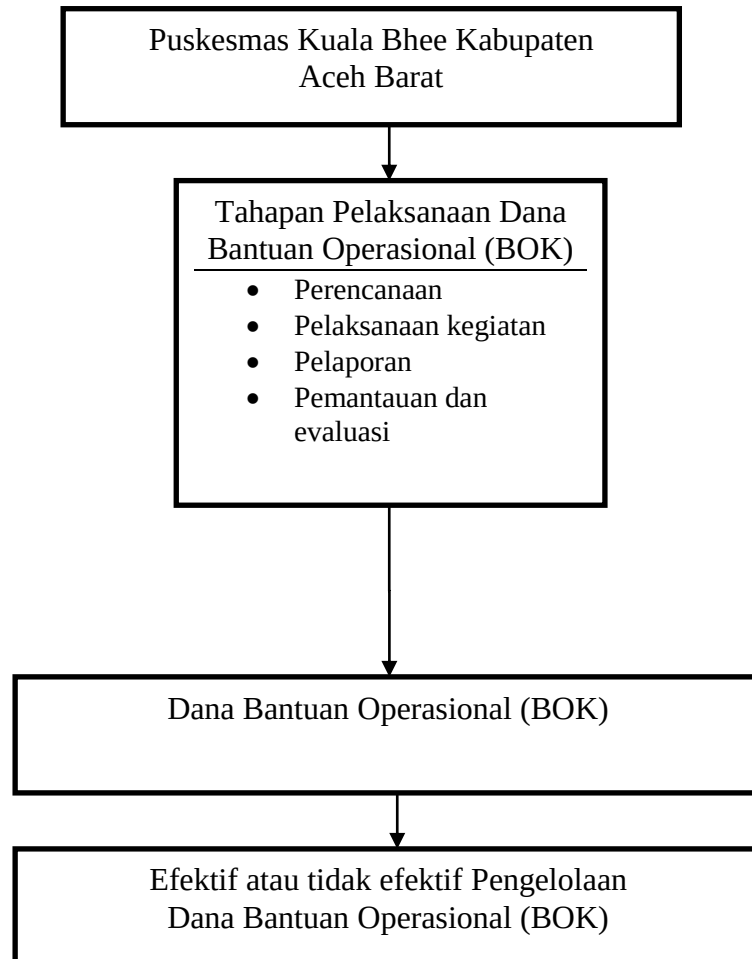
No	Judul dan Nama Penelitian	Model penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Tingkat Kemandirian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Menilai Capaian Kinerja Di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan. (Megawati et al., 2023)	Penelitian Kualitatif	Hasil analisis efisiensi dapat diketahui penggunaan Dana BOK Puskesmas Gemaharjo masuk dalam kategori predictable. Terlihat pada saat pelaksanaan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang tidak terdani oleh Dana BOK dapat dilaksanakan dengan cara bergabung dengan kegiatan yang di dani oleh Dana BOK. Pengelolaan Dana BOK Puskesmas masuk dalam kategori efektif.	Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
4	Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci Tahun 2020 (Nopel, 2022)	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sanggaran Agung sudah berjalan sesuai petunjuk teknis pengelolaan BOK tahun 2020. Hal ini berarti bahwa Pengelolaan dana BOK di Puskesmas Sanggaran Agung sudah terlaksana dengan baik. Namun di bagian pelaporan belum terlaksana tepat waktu karena didukung oleh SDM yang berkualitas. Disarankan kepada pengelola BOK agar SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana diberi bekal materi yang cukup mengenai system pelaporan.	Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020 (Saharuddin & Katjina 2021)	Penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Baubau telah memenuhi tujuan akuntabilitas dengan baik dan bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan transparan, hal ini terlihat pada sistem kesiapsagaan yang melibatkan semua pihak yaitu pelayanan kesehatan, petugas Dinas Kesehatan Kota Baubau dapat dikatakan berjalan dengan baik.	Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) memerlukan pendekatan yang sistematis untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah pengelolaan dan pelaporan dana secara transparan. Sistem ini juga akan membantu dalam pemantauan real-time penggunaan dana di berbagai puskesmas. Pengelolaan dana BOK harus lebih mengedepankan aspek kebutuhan nyata puskesmas. Dengan melibatkan tenaga medis dan masyarakat dalam proses perencanaan, dana BOK akan lebih efektif digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, seperti pengadaan obat atau alat medis yang kekurangan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang efektif merupakan kunci untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2024)

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang efisien dan transparan sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di puskesmas. Meskipun sudah ada upaya dalam pengelolaan dana BOK, tantangan seperti keterlambatan penyaluran, pengelolaan yang tidak profesional, dan penyalahgunaan dana masih harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan pengawasan, peningkatan kualitas SDM, serta pengelolaan yang berbasis kebutuhan untuk memastikan bahwa dana BOK dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2021:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu;

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.

3.1.2. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan yakni Kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengelolaan dana BOK.

3.1.3. Horison Waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *time series*. Menurut Suyanto dan Susila (2021:18) *Time series* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. *Time series* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4. Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk di analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis individu yaitu dana BOK pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2021:49):

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian.
- b. Data Sekunder berupa data laporan keuangan Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada periode 2022-2024.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, Menurut Sugiyono (2021:47) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada petugas puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat. untuk mengetahui sejarah organisasi, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat fenomena yang terjadi di lapangan.

3.3 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2021:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu. Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah kerja administratif, yaitu satu wilayah kecamatan atau beberapa desa/ kelurahan disatu wilayah kecamatan. Faktor luas wilayah, kondisi dan jumlah penduduk, merupakan dasar pertimbangan untuk membangun dan menentukan wilayah kerja Puskesmas. Menurut standar kementerian Kesehatan RI, rasio kecukupan jumlah Puskesmas adalah 1: 30.000 penduduk, Sedangkan jumlah penduduk di UPTD Puskesmas Kuala Bhee sebesar 13.628 Kurang dari standard rasio jumlah penduduk dengan puskesmas.

UPTD Puskesmas Kuala Bhee berada di Kecamatan Woyla yang merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan luas Wilayah $\pm$ 249,04 Km² dengan Presentase Luas Kecamatan terhadap luas Kabupaten Aceh Barat adalah 8,51 % dengan Batas-batas Kecamatan adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Woyla Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bubon
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Woyla Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI

Kecamatan Woyla dengan Ibu Kota Kecamatan terletak di Desa Kuala Bhee terdiri atas 43 (Empat Puluh Tiga) Desa yang bernaung dibawah 3 (Tiga)

Kemukiman yang terdiri atas Desa-Desa yang secara Geografis Hampir 50% terletak di tepi atau sekitar hutan dan sebahagian lagi terletak diluar kawasan hutan yang dilintasi oleh sebuah Sungai besar yaitu Sungai (Krueng) Woyla yang bermuara ke Desa Pribu Kecamatan Arongan Lambalek. Jarak tempuh dari Desa yang paling jauh ke Ibu Kota Kecamatan adalah ± 14 Km dan saat ini sudah dapat di jangkau dengan menggunakan kendaraan Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat), sedangkan jarak antara Ibu Kota Kecamatan Woyla dengan Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat ± 35 Km dengan Waktu tempuh ± 45 Menit.

4.1.2 Visi dan Misi Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Visi Puskesmas Kuala Bhee adalah “Terwujudnya pelayanan yang Optimal Kepada Seluruh Masyarakat Kecamatan Woyla”, seperti halnya tersebut diatas yang bahwa visi Puskesmas Kuala Bhee untuk mewujudkan tingkat pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Woyla dan dengan demikian seluruh staf pada Puskesmas Kuala Bhee adalah sebagai suksesor terhadap visi tersebut serta berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal dari tahun sebelumnya disamping dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Lintas Sektoral, Lembaga Pemerintah lainnya serta dukungan dari seluruh masyarakat Kecamatan Woyla sehingga pada akhirnya pelayanan optimal dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Woyla khususnya di masa yang akan datang. Visi Puskesmas Kuala Bhee juga adalah bahagian dari visi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat yakni mencapai Kabupaten Aceh Barat Sehat

Misi Puskesmas Kuala Bhee untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan kesehatan yang handal, Profesional dan Merata
2. Meningkatkan Profesionalisme dan tanggung jawab Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kuala Bhee
3. Meningkatkan Kerjasama lintas sektoral untuk mendukung kelancaran pelayanan di puskesmas Kuala Bhee sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
5. Membangun Citra Pelayanan dengan memperlakukan penggunaan layanan sebagai pusat perhatian.

4.1.4 Strategi Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Untuk mencapai Visi dan Misi Puskesmas Kuala Bhee perlu diketahui bahwa yang menjadi latar belakang terbentuknya visi dan misi tersebut adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Woyla sehingga hal ini menjadi suatu bahagian yang mungkin dicapai dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang, namun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan dan kendala antara lain :

1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebiasaan hidup bersih, lingkungan sehat dan pola hidup yang tidak sehat.
2. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang beradasarana dan prasarana dalam membina desa terutama Tenaga Kesling, Laboratorium, Perawat

Gigi, dokter gigi dan Dokter Umum. Masih ditemukan Kasus gizi kurang, dikarenakan Ibu tidak membawakan anaknya ke Posyandu.

3. Rendahnya tingkat perekonomian Masyarakat.
4. Kualitas tenaga kesehatan belum memadai.
5. Program JKN belum berjalan dengan Maksimal.

Dengan permasalahan yang muncul selama ini UPTD Puskesmas Kuala Bhee akan terus mengupayakan pelayanan yang lebih optimal serta akan melakukan berbagai terobosan dan perbaikan di berbagai sektor program Puskesmas sehingga pembangunan dalam bidang kesehatan dapat terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya mutu kesehatan masyarakat di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Adapun Issu Strategis yang menjadi prioritas UPTD Puskesmas Kuala Bhee untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat antara lain :

1. Peningkatan Mutu Pelayanan tenaga Kesehatan.
2. Penambahan Jumlah TenagaKesling, Laboratorium, Perawat Gigi, dokter gigi, dan Dokter Umum.
3. Peningkatan jumlah kunjungan dan pelayanan ke Desa oleh tenaga kesehatan.
4. Peningkatan Survey deteksi dini ke desa terhadap kemungkinan adanya penyakit menular dan tidak menular yang berkembang dalam masyarakat.
5. Pengembangan Desa Uci dan Desa Siaga.
6. Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap pentingnya sehat sebelum sakit.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi, adalah proses yang saling terkait dan harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan pengelolaan dana ini, mulai dari memastikan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, memastikan pelaporan yang akurat, hingga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dana BOK digunakan secara optimal demi peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Jika setiap tahapan tersebut dilakukan dengan baik, maka tujuan penggunaan dana BOK untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dapat tercapai dengan efektif.

4.2.2 Analisis Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

1. Analisis Perencanaan

Perencanaan adalah langkah pertama yang sangat krusial dalam pengelolaan dana BOK pada Puskesmas Kuala Bhee. Pada tahap ini, pihak Puskesmas bersama dengan pihak terkait seperti dinas kesehatan Kabupaten Aceh Barat, merencanakan alokasi dan penggunaan dana BOK untuk mendukung pelayanan kesehatan di daerah

tersebut. Puskesmas Kuala Bhee mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan yang mendesak, seperti pengadaan obat-obatan, vaksin, alat medis, dan kegiatan kesehatan lainnya. Penentuan prioritas berdasarkan data kesehatan dan masalah kesehatan yang dihadapi masyarakat sangat penting untuk merumuskan rencana yang tepat. Puskesmas membuat rincian anggaran yang jelas, misalnya untuk biaya operasional harian, biaya tenaga kesehatan, pelatihan staf, serta perbaikan sarana prasarana. Rencana anggaran harus disusun berdasarkan standar biaya yang berlaku dan harus memperhitungkan efisiensi serta kebutuhan yang mendesak. Menentukan indikator keberhasilan dalam penggunaan dana BOK, seperti peningkatan cakupan imunisasi, pengurangan angka kematian ibu dan bayi, atau meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kuala Bhee.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat saat ini dari perencanaan setiap tahun dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena tidak ada hambatan bagi pegawai atau aparatur Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat. Puskesmas Kuala Bhee telah melakukan perencanaan yang matang dan berbasis pada data dan kebutuhan lokal. Rencana penggunaan dana BOK disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan disesuaikan dengan prioritas kesehatan di daerah tersebut.

2. Analisis Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, dana BOK yang telah direncanakan digunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan. Puskesmas Kuala Bhee harus memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Puskesmas memonitor apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah disusun dan apakah dana digunakan untuk kegiatan yang sudah direncanakan. Penggunaan dana harus tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kesehatan yang telah ditentukan. Dana harus digunakan dengan bijak dan efisien, seperti dalam pengadaan alat medis, biaya administrasi, dan biaya operasional lainnya. Puskesmas juga perlu memastikan bahwa tidak ada pemborosan atau penggunaan dana yang tidak perlu. Selama pelaksanaan, Puskesmas perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, misalnya melalui laporan berkala atau supervisi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat saat ini dari pelaksanaan setiap tahun dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Setiap tahun, dana BOK digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, serta penyediaan obat dan alat kesehatan. Puskesmas mampu melaksanakan program-program kesehatan dengan baik sesuai anggaran yang tersedia, dan pelayanan kesehatan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan penggunaan dana yang tepat, Puskesmas Kuala Bhee dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan angka imunisasi, akses kesehatan ibu dan anak, serta penanganan penyakit menular yang lebih baik.

3. Analisis Pelaporan

Pencatatan dan pembukuan yang akurat adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOK. Puskesmas Kuala Bhee harus mencatat semua transaksi keuangan dengan rapi dan tepat. Semua pengeluaran dana BOK harus dicatat dengan jelas dalam buku kas atau sistem pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Setiap transaksi harus tercatat dengan lengkap, termasuk tanggal, jumlah, dan rincian penggunaan. Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah seperti kuitansi, faktur, atau dokumen lain yang relevan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan. Pembukuan harus selalu dipantau dan diperiksa secara rutin untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pencatatan yang dapat berpotensi mengganggu akuntabilitas.

Pelaporan adalah bagian terakhir dari pengelolaan dana BOK yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada pihak yang berkepentingan. Puskesmas Kuala Bhee harus menyusun laporan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau masyarakat. Analisis pelaporan mencakup Puskesmas perlu menyusun laporan secara berkala (misalnya bulanan atau tahunan) mengenai penggunaan dana BOK, yang meliputi penggunaan anggaran, pencapaian hasil, dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Laporan yang disusun harus sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Semua laporan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Laporan harus disusun dengan transparan dan mudah diakses oleh semua pihak

yang berkepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana BOK di Puskesmas Kuala Bhee.

Tahap pertanggungjawaban adalah saat Puskesmas Kuala Bhee menyusun laporan yang menggambarkan penggunaan dana BOK dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Analisis pertanggungjawaban mencakup Puskesmas harus membuat laporan keuangan yang memuat rincian penggunaan dana BOK, termasuk pengeluaran untuk setiap pos anggaran. Laporan ini harus disusun dengan jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Kuala Bhee secara rutin dan transparan melaporkan penggunaan dana BOK kepada pihak berwenang. Laporan yang disusun mencakup rincian penggunaan dana yang jelas, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Puskesmas juga memastikan bahwa pelaporan penggunaan dana BOK dilakukan secara transparan dan tepat waktu, dengan rincian yang jelas, sehingga pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang.

4. Analisis Pemantauan dan Evaluasi

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat, tetapi juga memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pemantauan

dan evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa dana BOK digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat.

Pemantauan ini bertujuan untuk memeriksa apakah kegiatan yang direncanakan dalam pengelolaan dana BOK telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Misalnya, pengadaan obat-obatan, vaksin, atau alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pelayanan di Puskesmas. Puskesmas juga memantau pelaksanaan kegiatan lainnya seperti pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelatihan tenaga medis. Pemantauan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dana BOK telah digunakan sesuai dengan rincian anggaran. Puskesmas harus memeriksa apakah pengeluaran dana tercatat dengan jelas dan sesuai dengan pos anggaran yang telah ditentukan. Semua transaksi keuangan harus dipantau secara transparan agar tidak ada penyimpangan atau pemborosan. Puskesmas Kuala Bhee juga harus menyusun laporan pemantauan secara berkala, baik itu laporan bulanan maupun tahunan, yang mencakup informasi tentang penggunaan dana BOK dan progres kegiatan yang telah dilakukan. Laporan ini akan digunakan untuk mengevaluasi apakah dana tersebut telah digunakan dengan optimal.

Evaluasi ini berfokus pada apakah dana yang digunakan telah sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Puskesmas melakukan analisis apakah ada sisa dana yang tidak terpakai atau apakah ada pengeluaran yang melebihi anggaran yang ditetapkan. Evaluasi keuangan juga mengidentifikasi apakah dana telah digunakan secara efisien dan tidak ada pemborosan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai apakah program yang dibiayai oleh dana BOK mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, jika dana digunakan untuk program

pencegahan penyakit, evaluasi dapat melihat apakah jumlah kasus penyakit menurun atau jika ada peningkatan jumlah peserta yang mengikuti program kesehatan. Evaluasi ini juga mencakup penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di Puskesmas. Puskesmas Kuala Bhee harus mengevaluasi sejauh mana dana BOK berhasil mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ini termasuk menilai pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti cakupan imunisasi, kunjungan pasien, atau kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa setiap tahun, Puskesmas Kuala Bhee menjalankan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh BOK. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan optimalisasi pengelolaan dana pada tahun berikutnya. Pemantauan terhadap kegiatan yang didanai oleh BOK dilakukan secara berkala, dan hasilnya dievaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan. Evaluasi ini juga digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengoptimalan pengelolaan dana di masa depan.

4.2.3 Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Untuk mengetahui efektifitas alokasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat digunakan rumus (Mahsun, 2014:187):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran (BOK)}}{\text{Target Anggaran (BOK)}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022

$$= \frac{938.932.060}{940.932.060} \times 100 = 99,79\%$$

b. Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2023

$$= \frac{931.066.200}{829.809.266} \times 100 = 89,12\%$$

c. Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2024

$$= \frac{675.565.323}{739.480.219} \times 100 = 91,35\%$$

Untuk mengetahui jumlah efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Target Anggaran Dana BOK (Rp)	Realisasi Dana BOK (Rp)	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2022	940.932.060	938.932.060	2.000.000	99,79%	Efektif
2	2023	931.066.200	829.809.266	101.256.934	89,12%	Cukup Efektif
3	2024	739.480.219	675.565.323	63.914.896	91,35%	Efektif

Sumber : Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat (2025)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 940.932.060 dan realisasi dari anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tersebut sebanyak Rp 938.932.060 dengan tingkat persentase 99,79% dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pada tahun 2023 anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebanyak Rp 931.066.200 dan realisasi anggaran

dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebanyak Rp 829.809.266 dengan tingkat persentase 89,12% dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan tahun 2024 anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebanyak 739.480.219 dan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebanyak Rp 675.565.323 dengan tingkat persentase sebanyak 91,35% dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, yang meliputi empat tahapan utama sesuai Pasal 15, yaitu perencanaan dan persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOK membutuhkan koordinasi yang baik antara Puskesmas dan pemerintah daerah. Tahap perencanaan dan persiapan teknis yang matang menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana BOK. Identifikasi kebutuhan kesehatan yang akurat, serta penyusunan anggaran yang sesuai dengan prioritas kegiatan, akan sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa perencanaan ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan yang baik memerlukan pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang efisien. Dana BOK yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengadaan obat, pelayanan kesehatan dasar, pelatihan SDM, dan promosi kesehatan, harus dikelola dengan baik untuk memastikan pencapaian tujuan yang

ditetapkan. Koordinasi yang baik antara Puskesmas dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam tahap ini. Pelaporan yang transparan dan akurat sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

Pemerintah daerah perlu memantau laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala untuk memastikan dana digunakan dengan tepat sesuai dengan rencana. Ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam pelaporan bisa mengurangi kredibilitas pengelolaan dana BOK. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan membantu untuk menilai efektivitas penggunaan dana dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul. Pemerintah daerah harus memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana BOK memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

4.3.2 Efektifitas Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat

Efektifitas anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dari tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Anggaran dana BOK	Realisasi Anggaran dana BOK	Suflus/Defisit	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2022	940.932.060	938.932.060	2.000.000	99,79%	Efektif
2	2023	931.066.200	829.809.266	101.256.934	89,12%	Cukup Efektif
3	2024	739.480.219	675.565.323	63.914.896	91,35%	Efektif

Sumber : Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat (2025)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas mengenai realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 sampai 2024 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2022 realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 938.932.060 dari anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 940.932.060 dengan tingkat persentase 99,79%, artinya masih ada sisa anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 2.000.000 yang tidak digunakan oleh pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2022 Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.
2. Pada tahun 2023 realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 829.809.266 dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 931.066.200 dengan tingkat persentase 100%, artinya penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) lebih dari target anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 101.256.934. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2023 Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan cukup efektif karena tingkat persentase antara 80-90%.
3. Pada tahun 2024 realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 675.565.323 dari total anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 739.480.219 dengan tingkat

persentase 91,35%, artinya penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) lebih dari target anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 63.914.896. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2024 Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat, yang tidak terealisasi hingga 100% dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu alasan yang dapat menyebabkan dana BOK tidak terealisasi secara penuh adalah keterlambatan dalam pengajuan atau proses administrasi yang berkaitan dengan pencairan dana. Jika ada kendala dalam proses administrasi, seperti ketidaksesuaian dokumen atau proses verifikasi yang memakan waktu, pencairan dana bisa tertunda, yang akhirnya menghambat realisasi anggaran. Kemudian jika anggaran dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana dalam waktu yang telah ditentukan, sebagian dana mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Proses pelaksanaan yang terlambat atau terhambat oleh berbagai faktor dapat menyebabkan dana tidak terealisasi sepenuhnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee, Kabupaten Aceh Barat dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi,
2. Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2022 dan tahun 2024 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%. Artinya pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Kuala Bhee Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2022 dan 2024 dikelola dengan baik walaupun masih banyak sisa anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kemudian Realisasi Anggaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2023 dapat dikelola dengan cukup efektif karena tingkat persentase antara 80-90%.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Puskesmas perlu memastikan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran BOK didasarkan pada data yang akurat mengenai kondisi kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan.
2. Pelatihan berkala bagi staf Puskesmas dalam hal pengelolaan keuangan, administrasi, dan pelaporan sangat penting agar dana BOK dikelola secara transparan dan akuntabel.
3. Memastikan bahwa petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan prosedur yang berlaku, serta mampu membuat laporan keuangan yang jelas dan tepat waktu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi, Nopri. (2021). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, (2021). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Azlin, n. (2020). *Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau*.Pekanbaru.
- Bastian, Indra. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Defitri, Siska Yulia. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita Vol. 3, No. 1, Hal 64-75*
- Halim, Abdul. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herawati, T. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research, XI(1), 1–14*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Mahmudi. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2021). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pert. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Megawati, S., Hartono, A., & Ulfah, I. K. (2023). Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Tingkat Kemandirian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Rangka Menilai Capaian Kinerja Di Puskesmas Gemaharjo Kabupaten Pacitan. *The Academy Of Management and Business*, Vol. 2, No. 1, 20-32
- Murni, Sri (2021) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*.

- Nopel, P. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sanggaran Agung Kecamatan Danau Kerinci Tahun 2020. *JAN Maha*, Vol. 4, No. 4. 63-71.
- Ponno, H., Marampa, A. M., Ta'dung, Y. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Awan Rantekarua. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 2, 1-7.
- Prawironegoro, Darsono. (2021). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Purnawamasari. (2021). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana BOK Di Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak Tahun 2020. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1 (1), 1-11
- Robbins SP, dan Judge. (2020). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Saharuddin, L. O., & Katjina, H. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, Vol. 3, No. 2, 164-182.
- Siagian, Sondang P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, B. (2020). *Akutansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, (2021). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta
- Suyanto dan Susila.(2021). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.
- Tamasoleng, A. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol.3 ,No.1, 2015: 97-110.
- Trianto, A. (2020) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.

Wibowo, H. Nurcihikita, T., & Kurniawan, J. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) Terhadap Pelayanan Kesehatan Di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023. *Jurnal Informatika Medis (J-INFORMED)*, Vol. 1, No. 2, 53-60.

Yunianti, Umi (2020) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*. ISBN 978-602-73690-3-0.